

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

### **Buku :**

Nugroho, Anjar. 2020. *Fikih Perempuan Kontemporer Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan*, UMP Press.

MK M. Anshary. 2016. *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, Mandar Maju.

Syawali, Husni. 2009. *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perempuan (Menurut KUH Perdata Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kementerian Agama RI, 2011, *al-Qur'an (tjm)*, Jakarta: Kalim.

Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muthmainnah, Yulianti. 2010. *Memposisikan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia*, Rahima.

**Jurnal :**

Mulyati, Dewi. 2017. *Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 5 (2) Nusa Tenggara Barat: Universitas Mataram.

Umami Lilik Kaltsum, 2012. *Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan Menurut Wahbah Zuhaili*. Jurnal PALASTRen Vol. 4 (2) Kudus: STAIN.

Sukardi. 2016. *Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies Vol. 6 (1) Pontianak: IAIN.

Dea Yohana Sacharissa. 2016. *Pemisahan Harta Perkawinan Melalui Permohonan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Yang Dilakukan Setelah Perkawinan (Studi Kasus)*, Jurnal Repertorium Vol. 3 (2) Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

**Website :**

Irma Purnamasari, Devita. 2014. "Apakah Hasil Pengembangan Harta Bawaan Menjadi Harta Gono Gini?" (Hukumonline, 30 Mei 2014) < tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt537c47d00be1f/apakah-hasil-pengembangan-harta-bawaan-menjadi-harta-gono-gini> accessed 23 Januari 2021>.

**Lain-lain :**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi, 27 Oktober 2016.

Nurul Sakdah dan Gregory John Kennedy Fournier, Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs, Pengadilan Agama Tigaraksa, 12 Februari 2020.